

## **IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDG's) DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI RIAU**

**Nelti Erwandari<sup>1</sup>**  
**Nim. 1002045203**

### ***Abstract***

*Food was a very important thing for the state and society, rice production in Riau in the last five years has decreased due to the conversion of wet land to palm plantation so it must import from neighbors provinces to meet the needs. This research aims to determine the implementation of SDGs (Sustainable Development Goals) to improve rice food security in Riau. As well as to explained the conditions, SDGs (Sustainable Development Goals) along with food security programs. The program was implemented since 2015 and will end in 2030. So to measure the effectiveness of the implementation of the program can not be saw significantly. Some programs that have were launched still need to be re-evaluated in order to create results as desired. In addition, the province of Riau is not as a rice granary so to achieve the results definitely require the right strategy and good. Efforts to improve food security (rice) in Riau has not yielded significant results.*

***Keywords :*** *Implementation of SDGs, Food Security, Riau*

### **Pendahuluan**

Keamanan bukan hanya menyangkut tentang keamanan negara, tetapi juga keamanan manusia yang ada di dalam negara tersebut (*human security*). Salah satu dari keamanan manusia ini adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar seperti pangan.

Persoalan pangan memiliki konsekuensi logis terhadap keamanan sebuah negara. Pernyataan ini berlaku sebaliknya. Kelangkaan pangan juga mampu menciptakan konflik. Sebuah konflik atau pun perang hanya akan menghancurkan sarana dan prasarana, tetapi juga lahan-lahan pertanian. Luas area panen merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan produksi padi nasional maupun daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah, luas area panen menjadi berkurang akibat pembangunan industri dan infrastruktur publik. Alasan jumlah penduduk ini menjadi faktor utama terjadinya pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Pada lahan pertanian sawah pada umumnya pengalihan fungsi sawah menjadi lahan perkebunan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: neltierwandari@gmail.com

Hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,5% per tahun. Bahkan jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 300 juta jiwa pada tahun 2030. Lonjakan jumlah penduduk menyebabkan laju permintaan terhadap pangan di Indonesia cukup tinggi yaitu 4,87%. Sementara laju pertumbuhan produktivitas padi sekitar 1% per tahun. (<https://www.bps.go.id>)

Salah satu penyebab impor bahan pangan adalah luas lahan pertanian yang semakin sempit. Terdapat kecenderungan bahwa konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian mengalami percepatan. Dari tahun 1981 sampai tahun 1999 terjadi konversi lahan sawah di Jawa seluas 1 Juta ha di Jawa dan 0,62 juta ha di luar Jawa. Walaupun dalam periode waktu yang sama dilakukan percontaan sawah seluas 0,52 juta ha di Jawa dan sekitar 2,7 juta ha di luar pulau Jawa, namun kenyataannya percontaan lahan sawah tanpa diikuti dengan pengontrolan konversi, tidak mampu membendung peningkatan ketergantungan Indonesia terhadap beras impor. (<http://www.kompasiana.com>)

Dilihat dari semua aspek, kondisi Indonesia sendiri masih banyak kekurangan. Kekurangan tersebut bukan semata berasal dari pemerintahannya saja tetapi penduduknya juga. Faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia harus mengimpor beras dan hasil pertanian lainnya diantaranya yaitu akibat meningkatnya jumlah penduduk yang tidak terkendali, meskipun sudah ada program Keluarga Berencana dari pemerintah, namun tetap saja kenaikan jumlah penduduk ini cukup tinggi. Dengan banyaknya penduduk, maka makanan pokok yang dibutuhkan juga begitu banyak, sehingga hasil pertanian dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.

Faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia harus mengimpor beras dan hasil pertanian lainnya diantaranya yaitu akibat meningkatnya jumlah penduduk yang tidak terkendali, meskipun sudah ada program Keluarga Berencana dari pemerintah, namun tetap saja kenaikan jumlah penduduk ini cukup tinggi. Dengan banyaknya penduduk, maka makanan pokok yang dibutuhkan juga begitu banyak, sehingga hasil pertanian dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.

Selain itu faktor cuaca juga menentukan seberapa banyak hasil panen dalam bertani. Cuaca yang tidak menentu, seperti pergeseran musim hujan dan musim kemarau menyebabkan petani kesulitan dalam menetapkan waktu yang tepat untuk mengawali masa tanam, dengan benih beserta pupuk yang digunakan sehingga tanaman yang ditanam mengalami pertumbuhan yang tidak wajar dan mengakibatkan gagal panen.

Penyebab lain petani mengubah fungsi sawah menjadi perkebunan sawit, yaitu :

1. Pendapatan usaha petani sawah lebih kecil dibandingkan dengan petani sawit. Begitu juga biaya yang dibutuhkan. Dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanaman sawah dibutuhkan biaya yang tinggi tetapi hasil yang dihasilkan rendah.
2. Padi rentan akan gagal panen yang disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari hama, penyakit, faktor alam seperti perubahan iklim dan banjir.
3. Para petani padi sulit mendapatkan kredit modal usaha.

4. Biaya produksi padi jauh lebih besar, mulai dari pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Berbeda dengan sawit yang biaya produksinya besar tetapi tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi.
5. Rusaknya infrastruktur irigasi

**Tabel Luas Lahan Sawah (Hektar)**

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jambi	112.434	113.757	113.379	113.546	101.195
2.	Riau	115.961	115.897	109.585	93.338	87.597
3.	Kalimantan Timur	82.796	90.518	90.887	63.306	55.485
4.	Bali	81.425	80.164	79.399	78.425	76.655
5.	DKI Jakarta	1.312	1.098	1.001	895	778

Tabel diatas merupakan beberapa Provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan luas lahan sawah. Dari banyaknya Provinsi di Indonesia yang mengalami alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang mengalihkan fungsi sawah ke perkebunan sawit. Provinsi ini terus melakukan impor beras dari provinsi tetangga seperti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Produksi beras di Riau hanya sebesar 52.2% dari jumlah kebutuhan konsumsi akan beras. Pengalihan fungsi lahan sawah menjadi lahan perkebunan sawit menjadi penyebab utama menurunnya jumlah produktivitas padi dalam lima tahun terakhir. (<https://www.bps.go.id>)

**Tabel Perbandingan Luas Sawah dan Perkebunan Sawit di Riau (Ha)**

	2011	2012	2013	2014	2015
luas sawah	145.242	144.015	118.518	106.037	107.546
luas sawit	2.258.553	2.372.402	2.399.172	2.411.820	2,424.545

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan terjadi secara berlebihan sudah tentu akan berdampak negatif bagi masa depan pertanian. Luas lahan pertanian produktif yang beralih fungsi terus bertambah yang akan mengakibatkan terjadi penurunan produksi pangan dan mengancam ketahanan pangan nasional, sedangkan kebutuhan pangan penduduk semakin besar karena adanya pertumbuhan penduduk yang juga semakin besar. ([http:// digilib.its.ac.id](http://digilib.its.ac.id))

Fenomena saat ini yang terjadi di Riau adalah alih fungsi lahan untuk komoditi yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi seperti kelapa sawit dan karet. Produksi beras yang dihasilkan di Riau sangat bergantung pada kondisi cuaca. Musim kemarau yang panjang serta buruknya sistem irigasi menjadi penghambat dalam pertanian beras.

Jumlah produksi beras di Riau mengalami penurunan tetapi tingkat konsumsi beras mengalami peningkatan. Tingginya permintaan akan beras mencapai dua kali lipat dari jumlah produksi yang ada. Untuk itu pemerintah Riau mengimpor beras dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan provinsi lainnya untuk memenuhi kebutuhan akan beras masyarakat.

Sejak tahun 2011 luas lahan sawah mengalami penurunan yang signifikan. Alih fungsi lahan menjadi trend di Riau dan dikhawatirkan Riau akan kehilangan lahan sawah dalam beberapa tahun kedepan. Kondisi itu berjalan beriringan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Sebagian besar perubahan lahan pertanian dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, hal ini dikarenakan petani menganggap kegiatan perkebunan kelapa sawit lebih menjanjikan jika dibandingkan dengan sawah. Hal ini tentunya menjadi salah satu akibat terjadinya perubahan pemanfaatan lahan dari kawasan pertanian lahan sawah menjadi perkebunan sawit. (<https://lampungpro.com>)

*Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah kelanjutan dari *Millenium Development Goals (MDGs)* yang berakhir tahun 2015. *Sustainable Development Goals (SDGs)* didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun kedepan hingga tahun 2030. Berbeda dengan *Millenium Development Goals (MDGs)* yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir *SDGs* lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil. (<http://theicph.com>)

Penyusunan *SDGs* sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target *MDGs* yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam *SDGs*. Seluruh tujuan, target dan indikator dalam dokumen *SDGs* juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini. Mulai tahun 2016, *SDGs* secara resmi menggantikan *MDGs*. *SDGs* berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. *SDGs* berisi 17 tujuan, Salah satu dari tujuan tersebut ialah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Dalam tujuan tersebut *SDGs* memiliki target-target yang harus tercapai, target tersebut juga meneruskan apa yang belum diselesaikan pada program *MDGs* yang hanya meningkatkan pendapatan dan mengakhiri kemiskinan juga kelaparan.

Sebelum adanya program *SDGs* di Riau *MDGs (Millenium Development Goals)* telah dahulu memiliki program dalam sektor pembangunan, kesehatan dan pendidikan, namun program *MDGs* yang ada di Riau lebih menitik beratkan pada program pemberantasan kemiskinan.

Melalui Badan Ketahanan Pangan, Riau mendukung rencana dan target yang dikeluarkan oleh PBB melalui *SDGs* yaitu dengan mewujudkan kondisi ketahanan pangan penduduk Riau sampai pada tingkat rumah tangga dengan memperhatikan aspek 3B (beragam, bergizi, berimbang), jaminan mutu dan keamanan pangan serta terjangkau akan daya beli masyarakat. Namun sebelum adanya *SDGs* pemerintah Riau telah berupaya dalam meningkatkan ketahanan pangan (beras) dengan cara mengimpor beras dari daerah tetangga seperti Sumatera Barat, Palembang dan Sumatera Utara sebanyak 751.000 ton dan produksi padi lokal 247.000 ton. Ketergantungan besar dari luar Riau mencapai 60 persen. Kebutuhan konsumsi

penduduk dan ketersediaan pangan (beras) di Provinsi Riau tergantung pada kelancaran dan kesinambungan/distribusi pangan baik antar provinsi maupun impor. (<https://korpri.id>)

Memperhatikan kondisi di atas, Pemerintah Riau mengambil program pembangunan pertanian, terutama tanaman padi. Di buatlah kebijakan khusus berupa kebijakan Operasi Pangan Riau Makmur ( OPRM ) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tani di pedesaan serta menanggulangi kemiskinan menuju masyarakat tani sejahtera dengan strategi produksi tanaman pangan berupa penguatan kelembagaan dan pembiayaan, pengamanan produksi, perluasan areal dan peningkatan produktivitas yang dimulai sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Visi yang ingin dicapai dari program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) adalah terwujudnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pangan yang berwawasan agribisnis dalam rangka menyukseskan program K2I Provinsi Riau.

Tujuan yang ingin dicapai dari OPRM adalah :

1. Membangun dan mengembangkan pertanian rakyat secara terpadu yang mampu memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat tani pedesaan dalam usaha penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat tani riau sejahtera.
2. Mengentaskan kantong-kantong kemiskinan di pedesaan melalui bantuan pendanaan dan infrastruktur pertanian.
3. Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi produktif pedesaan melalui peningkatan kesempatan berusaha dan bekerja bagi masyarakat sekitarnya, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah.
4. Mewujudkan Sumber Daya manusia( SDM) petani yang sungguh dan terampil.

Dalam pelaksanaannya program OPRM memiliki banyak kendala, Hal ini dikarenakan program OPRM tersebut lebih banyak menyentuh aspek perluasan areal dan hanya sedikit menyentuh aspek ekonomi dan social kemasyarakatan. Peningkatan areal tanam menghadapi kendala persaingan tanah dengan komoditi lain yang lebih menguntungkan petani, seperti persaingan dengan tanaman kelapa sawit. Hal ini telah memicu terjadinya alih fungsi lahan yang cukup besar di daerah Riau. Program OPRM telah berakhir pada tahun 2014 namun pemerintah provinsi Riau belum cukup bisa memecahkan permasalahan yang ada. Dilanjutkan pada tahun berikutnya melalui program SDG's yang telah disaring dan dimasukkan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Provinsi Riau memiliki program dan kegiatan penyuluhan yang sudah direncanakan yaitu : Desa Mandiri Benih, Program Cetak Sawah, dan Program inovasi untuk mengolah makanan alternative selain beras ialah sagu. (<https://ejournal.unri.ac.id>)

### **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

#### ***Konsep Ketahanan Pangan (Food Security)***

Dalam Ilmu Hubungan Internasional konsep *food security* merupakan salah satu cakupan yang dibahas dalam konsep *human security*. Konsep ini berkembang dari waktu ke waktu karena adanya pembangunan internasional sejak tahun 1960an Dalam perkembangannya, pemahaman ketahanan pangan tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena tergantung pada sumber daya yang dimiliki. Suatu negara bisa menghasilkan dan mengespor komoditas pertanian yang

bernilai tinggi tetapi sering dijumpai masyarakatnya yang kelaparan karena ada hambatan akses dan distribusi. Alur Perkembangan Pemahaman *Food Security*:

- a. 1960 = Pangan untuk Pembangunan
- b. 1970 = Jaminan Pangan
- c. 1980 = Memperluas Ketahanan Pangan
- d. 1990 = Bebas dari Kelaparan dan Kekurangan Gizi
- e. 2000 = Pangan dan Gizi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pembangunan

Ketahanan pangan adalah suatu keadaan dimana pangan tersedia bagi setiap individu setiap saat dimana saja baik secara fisik, maupun ekonomi. Dalam *World Food Conference*, *food security* didefinisikan dengan penekanan pada pasokan, ketersediaan setiap saat untuk mengimbangi fluktuasi produksi dan harga. *World Food Summit* tahun 1996 menyatakan bahwa keamanan pangan "ada ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka dan preferensi makanan untuk hidup aktif dan sehat". Ada tiga aspek yang menjadi indikator ketahanan pangan suatu wilayah, yaitu sektor ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi (harga) pangan, dan akses fisik maupun ekonomi bagi setiap individu untuk mendapatkan pangan. (Food and Agriculture Organization (November 1996))

Menurut Maxwell and Frankenberger mendefinisikan *food security* sebagai "terjaminnya akses setiap saat untuk pangan yang cukup". Istilah menjamin akses, waktu, dan cukup secara khusus didefinisikan dalam berbagai arti misalnya, beberapa orang memiliki perspektif pangan yang cukup untuk bertahan hidup sementara yang lainnya mengusulkan arti yang lebih baru dari ketahanan pangan, yaitu cukup pangan untuk hidup aktif dan sehat. Adapun sistem ketahanan pangannya yaitu Sistem ketersediaan (*food availability*), Akses pangan (*food access*), Penyerapan pangan (*food utilization*), Stabilitas (*stability*), dan Status gizi (*Nutritional status*) . (Maxwell S. and Frankenberger T. 1992)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Republik Indonesia secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan karena sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang dihasilkan. UU No. 18 Tahun 2012 ini berisi tentang kerangka kebijakan ketahanan pangan nasional yang difokuskan pada dua hal yaitu kedaulatan pangan dan kemandirian pangan dengan tetap memperhatikan keamanan pangan.

### ***Konsep Implementasi***

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Pendapat Peter S. Cleaves secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup "Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik". Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai

demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. (Abdul Wahab, Solichin. 2008.)

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, mengintrepetasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program – program tersebut dengan tujuan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berupaya untuk menggambarkan implementasi *sustainable development goals* (SDGs) dalam meningkatkan ketahanan pangan di provinsi Riau. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari buku, media massa, artikel, internet, dan sumber-sumber lainnya yang membahas permasalahan mendukung. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka (*library research*). Teknik analisis data yang telah digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yang menjelaskan dan menganalisis data dengan cara menggambarkan hasil penelitian melalui sejumlah data yang berhasil diperlukan penulis, kemudian menyajikan hasil dari penelitian tersebut yaitu implementasi *sustainable development goals* (SDGs) dalam meningkatkan ketahanan pangan di provinsi Riau.

### **Hasil Penelitian**

Pemerintah Riau menyadari bahwa mengimplementasikan program SDGs akan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Riau, termasuk petani kecil. Riau bekerja sama dengan UNDP dan *Tanoto Foundation* dengan membentuk sekretariat SDGs di kantor Bappeda pada Mei 2016 dengan tujuan untuk mengumpulkan kemitraan dan pemerintah untuk tercapainya SDGs.

### ***Implementasi program SDGs di Riau untuk meningkatkan ketahanan pangan***

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang pangan, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. (<http://diskepang.riau.go.id>)

Secara keseluruhan, Riau memiliki strategi yang ingin dicapai yang tertuang di dalam Badan Ketahanan Provinsi yaitu :

1. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan
2. Tercapainya ketersediaan pangan utama, yaitu beras
3. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
4. Tercapainya ketersediaan informasi, pasokan harga, dan akses pangan strategis di daera
5. Tercapainya penanganan daerah rawan panga
6. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat
7. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan

Dari ketujuh sasaran strategis tentang ketahanan pangan yang ingin dicapai, terdapat 3 sasaran strategis yang mengarah kepada peningkatan ketahanan pangan utama yang akan dibahas dalam bab ini yaitu beras. Sasaran strategis tersebut adalah :

### ***1. Tercapainya koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan***

Indikator yang digunakan dalam mencapai efektifitas sasaran ini adalah jumlah regulasi dan kebijakan mengenai ketahanan pangan dalam hal ini adalah kebijakan mengenai peningkatan produksi beras. Gubernur Provinsi Riau mendorong kepada daerah di kabupaten atau kota membuat regulasi untuk mempertahankan peruntukan lahan pertanian tidak dialih fungsikan ke lahan sawit.

Tahapan yang dilakukan agar tercapainya efektifitas perumusan kebijakan ketahanan pangan beras :

1. Mengadakan sebuah forum koordinasi dengan instansi vertikal yang terlibat seperti BULOG, badan karantina, dan Balai POM. Kemudian satuan Kerja Perangkat Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah.
2. Melakukan perumusan regulasi kebijakan mengenai beras
3. Melakukan evaluasi terhadap regulasi yang akan dibuat menjadi kebijakan.
4. Membentuk Tim Teknis untuk membantu sehari-hari Ketua Dewan Ketahanan Pangan baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota.

Langkah operasional yang diambil untuk mengimplementasikan ketersediaan dan peningkatan produksi beras dari forum ini adalah Pertama, Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan. Kemudian akan ada hasil dan manfaat dari koordinasi ini serta tindak lanjut dan pemantauan. Kedua, Meningkatkan peran koordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan, dengan menambah frekuensi rapat minimal 2 kali setahun, yaitu pada awal dan akhir tahun anggaran. Ketiga, Meningkatkan kinerja kapasitas aparatur yang berkaitan. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data seta evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan pemantauan produksi. Keempat, Melakukan kajian ketersediaan, akses, dan kerawanan pangan. Dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program lainnya.

Hambatan yang dihadapi adalah:

1. Belum adanya regulasi kebijakan yang tercapai khusus mengenai peningkatan produksi beras yang mengikat secara hukum demi mencapai ketahanan pangan utama yaitu beras.
  2. Koordinasi Tidak Berjalan Lancar Antara Pemerintah Propinsi Dengan Kabupaten/ Kota
  3. Keragaman Pangan Dan Keberimbangan Gizi Untuk Konsumsi Penduduk Riau Yang Masih Perlu Diperbaiki
  4. Prevalensi Daerah Yang Berpotensi Rawan Pangan
  5. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau
  6. Kurangnya Sumber Daya Manusia
  7. Keterbatasan Dana Pelaksanaan Kegiatan (Dukungan Anggaran)
2. ***Tercapainya ketersediaan pangan utama, yaitu beras dan Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat***

Pemerintah menjadi kunci dalam hal meningkatkan produksi beras sehingga kebutuhan akan konsumsi masyarakat terpenuhi sehingga tidak perlu lagi mengimpor beras dari provinsi lain. Ketersediaan beras dari produksi beras dan pasokan impor dari luar daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, dan provinsi lain di luar pulau Sumatera. Total ketersediaan pangan tahun 2015 adalah 853.173 ton, meningkat sebanyak 8,68% dari yang ditargetkan pada tahun 2015 sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019. Dilihat dari data produksi tahun 2010-2015, produksi padi semakin menurun. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk, 47.8 % di impor dari provinsi lain. (<http://diskepang.riau.go.id>)

Indikator dalam ketersediaan pangan utama adalah :

1. Produksi beras Riau  
Dikatakan produksi beras ialah jika produksi beras yang dihasilkan telah mencukupi jumlah konsumsi yang dibutuhkan di provinsi Riau.
2. Pasokan atau impor dari daerah lain  
Sementara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras provinsi Riau masih menerima pasokan beras dari provinsi tetangga, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan provinsi lainnya.

Tahapan yang dilakukan untuk pencapaian ketersediaan beras tersebut adalah :

- a. Membangun kerjasama distribusi beras antara lumbung pangan antar provinsi pemasok dan antar kabupaten dalam upaya membangun stabilitas pasokan.
- b. Berkoordinasi dengan Dinas perhubungan, BMPD, Kepolisian dalam rangka pengamanan jalur distribusi dan pasokan pangan dapat terjaga sepanjang waktu.
- c. Penguatan ketersediaan pangan di lumbung pangan sehingga gabah dan beras tersedia selalu di lumbung pangan dan penggilingan dalam rangka pengamanan ketersediaan pangan pada saat panceklik.
- d. peningkatan produksi melalui peningkatan produksi secara intensifikasi dan ekstensifikasi melalui kegiatan Dinas Pertanian. Peningkatan produksi

diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras dari daerah lain.

Langkah operasional yang dilakukan untuk mengimplementasikan ketersediaan dan peningkatan pangan adalah :

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan produksi beras daerah, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani.
2. Menggerakkan masyarakat dan pemerintah untuk memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.
3. Melanjutkan Intensifikasi Padi, Jagung dan Kedele dengan teknologi yang lebih baik, perluasan penanaman dengan cara menggerakkan petani mengolah sawah/lahan tidur, penanaman padi gogo/ padi lahan kering dengan memberi bantuan sarana produksi (saprodi) dan pengolahan tanah. Khusus padi sawah agar penyuluh memberi bimbingan teknis budidaya dengan teknologi budidaya yang baru Legowo 2:1 atau “ three-in-one “ yang telah berhasil efektif menaikkan produksi.
4. Penghentian alih fungsi lahan pertanian pangan, menindak lanjuti segera UU 41 Tahun 2009, dengan menerbitkan PERDA, dan merumuskan “INSENTIF” produksi yang merangsang petani pangan mempertahankan dan mengembangkan usaha taninya.
5. Melakukan program dan kegiatan penyuluhan yang sudah direncanakan sesuai dengan RPJMD yaitu : ([diskepang.riau.go.id](http://diskepang.riau.go.id))
  - a. Desa mandiri benih, yang program pemerintah pusat guna meningkatkan produksi beras, program ini dilakukan oleh Riau dalam memenuhi kebutuhan konsumsi beras yang tinggi tetapi produksi beras hanya mencapai setengah dari konsumsi. Dengan adanya program mandiri benih, petani kecil bisa dengan mudah mendapatkan benih dengan harga yang terjangkau atau bahkan membuat bibit sendiri.
  - b. Program cetak sawah guna memperluas lahan panen sehingga produksi bisa ditingkatkan. Program ini ditujukan untuk mengurangi aktivitas pengalihan fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian seperti sawit.
  - c. Meningkatkan kegiatan penyuluhan untuk peningkatan konsumsi ikan,telur,sagu, umbi-umbian, sayuran dan Buah dengan slogan “Gemar Makan Ikan dan Telur“, “Senang Makan Sayur dan Buah“ serta “Suka Makan Sagu dan Umbi-Umbian“. Gerakan ini dilakukan secara terpadu, kerjasama yang efektif dengan TP- PKK baik tingkat Provinsi , Kabupaten,Kecamatan sampai tingkat Desa
  - d. Menghadapi tingginya konsumsi akan beras, Riau menciptakan program inovasi untuk mengolah makanan alternative selain beras, yaitu sagu. Program ini dijadikan kompetisi terbuka bagi seluruh masyarakat Riau yang bisa mengolah makanan pokok pengganti beras. Diharapkan masyarakat Riau bisa menggunakan sagu sebagai makanan pokok utama menggantikan beras.

Hambatan yang dihadapi adalah:

1. Menyempitnya luas lahan produksi yang dikarenakan banyak sawah yang beralih fungsi menjadi area perkebunan atau perumahan penduduk. Dengan

berkurangnya lahan sawah maka berkurang juga jumlah produksi beras. Tingginya alih fungsi lahan sawah menjadi sawit dikarenakan penghasilan yang diperoleh lebih besar serta harga jual yang rendah.

2. Kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan, perikanan maupun peternakan sehingga hasilnya tidak mampi mensejahterakan petani dan berakibat pada kurangnya investasi untuk peningkatan produksi;
3. Terbatasnya teknologi tepat guna yang dapat diakses oleh petani;
4. Kurangnya bimbingan kepada petani karena tidak difungsikannya institusi penyuluhan pertanian secara optimal seperti pada masa lalu;
5. Jenis tanah yang didominasi oleh jenis lahan gambut yang susah untuk ditanami jenis padi dan membutuhkan pengolahan yang rumit.;
6. Sistem pengairan yang sebagian besar masih tadah hujan; dan
7. Rendahnya akses petani terhadap modal usaha

### **3. *Tercapainya informasi, pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah***

Aspek distribusi pangan dapat digambarkan sebagai suatu proses yang dinamis tentang bagaimana pangan itu disalurkan kepada konsumen atau rumah tangga dari waktu ke waktu. Untuk memperoleh informasi tentang aspek distribusi pangan ini dibutuhkan informasi dasar yang terkait dengan harga, pasokan, dan akses pangan.

Gejolak harga pangan dapat menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Ketidacukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator adanya gangguan pada proses distribusi seperti kurangnya sarana transportasi, adanya dampak iklim seperti banjir, gelombang tinggi, dan sebagainya. Sementara itu, akses pangan dapat menjadi indikator tentang berhasil atau tidaknya proses distribusi pangan yang dapat menggambarkan apakah pangan telah didistribusikan dengan merata dan terjangkau oleh masyarakat secara fisik dan ekonominya.

Tahapan dalam sasaran strategi ini adalah

- a. Mengembangkan basis data pasokan, harga dan akses pangan yang mudah diakses
- b. Menyediakan data atau informasi yang cepat dan akurat tentang pasokan. Harga dan akses pangan sebagai bahan deteksi dini untuk mengantisipasi terjadinya gangguan distribusi pangan
- c. Menyediakan hasil analisis tentang pasokan, harga dan akses pangan secara periodik sebagai bahan perumusan kebijakan
- d. Pemantauan harga pangan dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Masing-masing kabupaten dan kota melaporkan harga pangan setiap minggu
- e. Analisis ketahanan dan kerentanan serta ketersediaan pangan di daerah. Hal ini dilakukan untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran/lokasi, penanganan kerawanan pangan dan gizi mulai dari tingkat desa sampai pusat.

Langkah operasional yang dilakukan untuk mengimplementasikan ketersediaan dan peningkatan pangan adalah :

1. Pemenuhan pangan utama bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, social, ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan.
2. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya dan kearifan local.
3. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan berbasis sumber daya local.
4. Penanganan keamanan pangan segar.

Pengelolaan cadangan pangan Riau diatur dalam Peraturan Gubernur No.12 tahun 2013 yang memiliki tujuan :

- a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
- b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana dan kerawanan pangan spesifik lokasi.
- c. Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar domestik maupun internasional.
- d. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik maupun rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Hambatan yang dihadapi dalam sasaran ini adalah kemiskinan dan SDM yang masih rendah. Lemahnya akses terhadap sumber daya seperti teknologi, informasi, dan modal menjadi hambatan yang dialami oleh petani sehingga petani mencari jalan lain untuk bisa terus menghasilkan uang. Sedangkan biaya produktivitas sangat tinggi berbeda dengan tanaman pertanian lainnya.

Dari ketiga sasaran strategi yang ingin dicapai Riau melalui program *SDG's (Sustainable Development Goals)* masing-masing telah dijelaskan apa saja tahapan, langkah maupun hambatan yang akan dihadapi. Adapun program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2015 dan akan berakhir pada tahun 2030. Sehingga untuk mengukur keefektifan pelaksanaan program tersebut belum dapat terlihat secara signifikan. Beberapa program yang telah dicanangkan masih perlu dievaluasi kembali agar tercipta hasil sesuai yang diinginkan. Selain itu pula provinsi Riau bukan sebagai lumbung padi sehingga untuk mencapai hasil pasti memerlukan strategi yang tepat dan baik. Upaya meningkatkan ketahanan pangan (beras) di Riau ternyata belum memberikan hasil yang signifikan.

### **Kesimpulan**

Ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan menjadi permasalahan dasar setiap bangsa tak terkecuali bangsa Indonesia yang komoditas pangan utamanya adalah padi dimana Indonesia juga memiliki populasi yang besar dan cakupan geografis yang luas. Provinsi Riau termasuk provinsi yang tingkat produksi beras rendah namun tingkat konsumsi tinggi. Tingginya konsumsi akan beras di Provinsi Riau tidak diimbangi dengan produksi yang ada. Salah satu penyebab semakin menurunnya tingkat produksi beras di Riau adalah semakin menurunnya luas sawah yang beralih fungsi menjadi tanaman non pertanian seperti sawit dan karet yang memiliki

penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan pertanian pangan. Selain itu, hambatan yang terjadi adalah lemahnya akses informasi dan teknologi serta kurangnya modal untuk melakukan pertanian berkelanjutan.

Melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah, Riau berusaha meningkatkan produksi beras agar tercapai ketahanan pangan yang sesuai dengan salah satu program SDGs. Program yang dilakukan oleh Riau antara lain desa mandiri benih, cetak sawah, inovasi makanan pokok pengganti beras, penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan ke desa-desa dengan memperkenalkan teknologi pertanian serta mengumpulkan informasi dan data statistik, sampai mengeluarkan kebijakan mengenai ketahanan pangan.

#### **Daftar Pustaka**

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. Hal. 187

*Data luas lahan sawah Indonesia 2003-2014* diakses melalui <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/895> pada tanggal 20 Juli 2017

*Filantropi SDGs di Riau*, diakses melalui <http://sdgfunders.org/reports/sdgs/country/indonesia/lang/en/> pada tanggal 15 mei 2017

*Food and Agriculture Organization, "Trade Reforms and Food Security : Conceptualizing the Linkage"*, diakses dari <http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm> pada tanggal 13 Oktober 2016

*Food and Agriculture Organization (November 1996). "Rome Declaration on Food Security and World Food Summit Plan of Action"*. Melalui pdf. Diakses 13 Oktober 2016

*Hebat, Pemerintah Riau Kuatkan Ketahanan Pangan Dengan Sagu* diakses melalui <https://korpri.id/berita/3873/hebat-pemerintah-riau-kuatkan-ketahanan-pangan-dengan-sagu> pada tanggal 17 mei 2017

Husein Sawit. *Artikel Majalah Pangan.* "Respon Negara Berkembang dan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Pangan Global 2007 - 2008" diunduh melalui <http://www.majalahpangan.com/artikel.php?id=139>

*International Conference on Public Health* diakses melalui [http://theicph.com/id\\_ID/icph/sustainable-development-goals/](http://theicph.com/id_ID/icph/sustainable-development-goals/) pada tanggal 16 mei 2017

*Ketahanan Pangan*, <http://www.budidayapetani.com/2015/06/ketahanan-pangan.html> diakses pada tanggal 16 Agustus 2016







